

**ANALISIS PEMENUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN
SEKTOR PAJAK**

Rachmad Gesah Mukti Prabowo

Staf Pengajar Prodi Akuntansi
Universitas Tulungagung
Email: r_gesah.mp@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sudah berperan aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif yaitu suatu analisa yang menggambarkan serta menjelaskan keadaan obyek penelitian dengan menyajikan data-data berbentuk tabel dan analisa data dengan menggunakan perhitungan matematis. Data yang digunakan adalah respon dari responden mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sepuluh pertanyaan pada kuisisioner yang dibagikan kepada responden, unsur pertanyaan/sampel ke 7 (Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?) berada dibawah Batas Kontrol Bawah (BKB). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas memiliki respon yang buruk dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang harus segera dicari penyebabnya dan dilakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut. Pihak kecamatan perlu mempertahankan prestasi kinerja agar terus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak supaya memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban mereka.

Kata kunci: Pemenuhan pembayaran, Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan sector pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the people in Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung already play an active role in paying land and building tax (PBB).The method is qualitatively and quantitatively that an analysis that describes and explains the state of the object of research by presenting tabular data and data analysis using mathematical calculations . The data used is the response of the respondents regarding the collection of land and building tax , land and building tax principal in Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Based on the results of this research is that of the ten questions on the questionnaire distributed to respondents , elemental question or sample to 7

(In paying taxes , if you did not mind) is below the Lower Control Limit (BKB) . This could mean that the elements of the question or sample above has a poor response in order to fulfill obligations Land and Building Tax in Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung that the cause should be sought immediately and made an attempt to repair it. Party districts need to maintain in order to continue to provide performance achievement socialization to the taxpayer that has the awareness and willingness to meet their obligations .



Keywords: Fulfillment of payment, land and building tax, the tax sector Acceptance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara. Membayar pajak oleh warga negara merupakan kewajiban dan penerimaan dari pajak ini sangat penting bagi pemerintah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik.

Seiring dengan itu, peranan pajak dalam hal pendanaan juga akan semakin besar. Oleh sebab itu diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak.

Banyak media dalam negeri mengabarkan tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak. Juga terdapat beberapa studi atau penelitian yang berkaitan dengan seputar hal tersebut. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak merupakan hal yang mendasar sekali. Merupakan suatu wujud sikap yang seiring sejalan dan merupakan satu kesatuan momentum yang harus dapat ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai targetnya. Sejak tahun 2008

terutama sejak peluncuran program sunset policy, program PWPM menyusul modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak semakin meningkat dan penerimaan negara dari sektor pajak pun turut meningkat tajam. Walaupun demikian masih terdapat potensi yang masih cukup besar. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam salah satu even pada bulan Agustus 2011 di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat sebagai berikut:

Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500.000 yang membayar pajak. Itu harus ditingkatkan kembali. Jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia sebanyak 118 juta dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40 persen dari angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi, jika dikalkulasikan, terdapat sebanyak 44 juta sampai 47 juta penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah.

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi/tanah dan bangunan. Sedangkan subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau suatu badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut sebagai wajib pajak.

Dewasa ini, pihak yang berperan aktif dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pihak aparat desa / kelurahan dan pihak aparat kecamatan selaku koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerahnya. Peran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sekarang ini belum terasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sudah berperan aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keaktifan masyarakat di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dalam memenuhi kewajiban mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari hasil tersebut diatas dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai dasar dalam mengambil tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. 2) Bagi Masyarakat, manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui sejauh mana tingkat keaktifan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk bidang penelitian yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak sudah lama ada, dari adanya upeti wajib kepada raja berupa hasil panen pada masa kerajaan, hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pada awalnya, pemungutan pajak berdasarkan aturan dari penguasa / raja, kini berubah melibatkan rakyat (pembayar pajak) melalui aturan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat melalui perwakilannya.

Soemitro (1990 : 5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (1997: 1) pengertian pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan imbalan jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah untuk belanja negara agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak berupa bumi dan atau bangunan.

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi/tanah dan bangunan. Sedangkan subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau suatu badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut sebagai wajib pajak.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pudjo Susilo Utomo (2002), Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Obyek dari penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Disain penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara meneliti untuk memusatkan perhatian pada kasus tertentu secara intensif dan mendetail, dengan melakukan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini adalah: Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Sistem penelitian tesis yang digunakan adalah diskriptif analisis, dengan mengumpulkan data melalui observasi, kuesioner, *interview*, dan studi dokumentasi. Lurah desa adalah pemimpin masyarakat, seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi dan kondisi yang dipimpin. Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-

baiknya. Dan kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Arif Amirudin (2008), Uji Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Obyek dari penelitian ini adalah adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh aparat Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Disain penelitian yang akan dipakai adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara meneliti untuk memusatkan perhatian pada kasus tertentu secara intensif dan mendetail, dengan melakukan pengujian efisiensi dan efektivitas terhadap pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pagerwojo untuk tahun 2007 sudah efisien, karena nilai CCER (*Cost of Collection Efficiency Ratio*) mencapai 0,0495.
- b. Efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pagerwojo hingga bulan Mei tahun 2008 sudah efisien, karena nilai CCER (*Cost of Collection Efficiency Ratio*) mencapai 0,050.

- c. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pagerwojo untuk tahun 2007 sebesar 91,810 % , maka dikatakan sangat efektif karena koefisien efektivitasnya diatas 80 %.
- d. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pagerwojo hingga bulan Mei tahun 2008 sebesar 17,455 % , maka dikatakan sangat tidak efektif karena koefisien efektivitasnya dibawah 40 %.

Arif Hardjanto (2010), Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Dikelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Adapun hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh positif antara sikap dan komunikasi secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan implementasi kebijakan PBB. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari George Edward III dengan teori pendukung dari Van Metern dan Horn serta teori Grindle. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *eksplanatory* disertai uji hipotesis. Sample berjumlah 33 responden (1%) dari jumlah keseluruhan wajib pajak 3372. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi *Rank Kendall*, *Konkordansi Kendall* dan Koefisiensi Determinasi. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikansi antara sikap dan implementasi kebijakan PBB yang diperoleh Z hitung

4,89 > 2,58 untuk taraf signifikansi 1%. Ada pengaruh positif dan signifikansi antara komunikasi dan implementasi kebijakan PBB yang diperoleh dari perhitungan Z hitung 3,03 > 2,58 pada taraf signifikansi 1% serta ada pengaruh positif antara sikap dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB dari perhitungan X hitung 85,72 > X tabel 55,75, sedangkan pengaruh sikap terhadap implementasi kebijakan PBB sebesar 35,76%. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB sebesar 13,76% dan besarnya pengaruh sikap dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan sebesar 79,74%.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sikap dan komunikasi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Gisikdrono. Saran yang diajukan adalah perlu ditingkatkannya kualitas pelaksanaan salah satunya dengan cara petugas harus lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu cara menganalisa data tanpa menggunakan perhitungan matematis yang bersifat interpretasi data yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang ada kemudian mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan terhadap peran serta masyarakat pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang dan yang berhubungan

dengan permasalahan tersebut. Metode analisa sebagai berikut:

1. Menganalisa respon dari responden menggunakan Diagram Kontrol Shewhart yaitu menggunakan Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x} .

Sudjana (1992:420) , diagram ini bentuknya sangat sederhana sekali yaitu terdiri atas tiga buah garis mendatar yang sejajar. Sumbu mendatar melukiskan nomor sampel yang diteliti dimulai dari sampel pertama, kedua dan seterusnya. Sumbu tegak menyatakan karakteristik yang sedang diteliti. Garis sentral melukiskan nilai baku yang akan menjadi pangkal perhitungan terjadinya penyimpangan hasil-hasil pengamatan untuk setiap sampel. Garis bawah yang sejajar dengan garis sentral dinamakan batas kontrol bawah (BKB). Garis yang menyatakan penyimpangan paling tinggi dari nilai baku terdapat sejajar diatas garis sentral yang dinamakan batas kontrol atas (BKA).

2. Menghitung rata-rata dari rata-rata sampel.

$$\bar{X} = \frac{\sum \bar{x}}{k} =$$

Garis Sentral

Dimana:

\bar{x} = Rata-rata dari rata-rata sampel

\bar{x} = Rata-rata

k = Jumlah unsur / sampel

3. Menghitung Rata-rata dari Rentang semua sampel

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{k}$$

Dimana :

\bar{R} = Rata-rata dari Rentang semua sampel

R = Rentang

4. Batas Kontrol Bawah (BKB)

$$BKB = \bar{x} - A_2 \bar{R}$$

Dimana:

A_2 = Harga untuk diagram kontrol \bar{x}

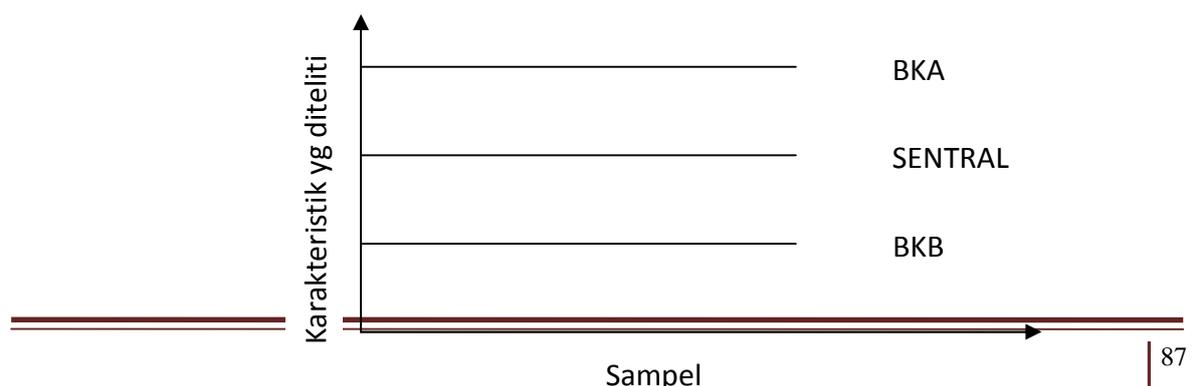
5. Batas Kontrol Atas (BKA)

$$BKA = \bar{x} + A_2 \bar{R}$$

Dimana:

A_2 = Harga untuk diagram kontrol \bar{x}

6. Membuat Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x}



PEMBAHASAN

Kecamatan Sendang merupakan wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak di bagian barat dari ibu kota Kabupaten Tulungagung dengan ketinggian sekitar 550 dpl. Kecamatan Sendang terbagi menjadi 11 Desa, yaitu: Desa Kedoyo, Desa Nglutung, Desa Talang, Desa Dono, Desa Krosok, Desa Tugu, Desa Picisan, Desa Nyawangan, Desa Sendang, Desa Nglurup dan Desa Geger.

Penduduk

Jumlah total penduduk di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung hingga Desember 2010 berjumlah 46.836 jiwa dengan 14.629 jumlah Kepala Keluarga (KK). Adapun rekapitulasi data jumlah penduduk Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Data Penduduk Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, 2012

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	L	P	Total	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk
1.	Kedoyo	10,25	2.815	2.763	5.563	1.604	543
2.	Nglutung	5,17	1.770	1.934	3.694	1.231	715
3.	Talang	2,98	1.492	1.672	3.157	1.055	1.059
4.	Dono	4,25	2.694	2.899	5.611	1.594	1.320
5.	Krosok	3,88	1.836	1.856	3.692	1.257	952
6.	Tugu	3,90	1.859	1.890	3.745	1.161	960
7.	Picisan	7,26	1.621	1.719	3.328	1.064	458
8.	Nyawangan	25,25	3.522	3.458	6.971	2.139	276
9.	Sendang	3,12	1.459	1.444	2.904	935	931
10.	Nglurup	10,28	1.803	1.891	3.730	1.183	363
11.	Geger	12,10	2.143	2.282	4.441	1.406	367
	TOTAL	88,44	23.015	23.809	46.836	14.629	530

Sumber : Data sekunder

Adapun Jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung baik yang permanen maupun tidak permanen adalah seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal, 2012

No.	Desa	Tempat Tinggal		Bukan Tempat Tinggal	
		Permanen	Bukan Permanen	Permanen	Bukan Permanen
1.	Kedoyo	984	458	31	6
2.	Nglutung	781	307	21	3
3.	Talang	707	248	19	2
4.	Dono	1.216	212	52	-
5.	Krosok	771	267	17	2
6.	Tugu	783	272	11	2
7.	Picisan	657	270	22	4
8.	Nyawangan	1.125	817	44	11
9.	Sendang	569	188	28	-
10.	Nglurup	640	424	35	5
11.	Geger	948	230	22	4
	TOTAL	9.181	3.693	302	39

Sumber : Data sekunder

Data dari kantor Kecamatan menunjukkan ada desa yang realisasi pajaknya terbesar adalah Desa Dono yaitu sebesar Rp. 120.960. 122,- seperti terlihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4: Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Desa dan Pemasukannya, 2012

No.	Desa	Wajib Pajak	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase
1.	Kedoyo	4.851	102.473.747	102.473.747	100%
2.	Nglutung	3.089	71.810.577	71.810.577	100%
3.	Talang	2.244	66.729.612	66.729.612	100%
4.	Dono	3.334	120.960.122	120.960.122	100%
5.	Krosok	2.809	108.619.578	108.619.578	100%
6.	Tugu	2.885	82.051.797	82.051.797	100%
7.	Picisan	2.797	69.438.874	69.438.874	100%
8.	Nyawangan	4.842	90.968.845	90.968.845	100%
9.	Sendang	1.794	57.603.982	57.603.982	100%
10.	Nglurup	2.359	65.236.938	65.236.938	100%
11.	Geger	3.149	74.809.957	74.809.957	100%
	TOTAL	34.153	910.704.029	910.704.029	100%

Sumber : Data sekunder

Sebanyak 17 responden dengan nilai skor total tertinggi yaitu responden nomor; 21, 23, 147, 154, 198, 212, 227, 248, 269, 286, 298, 306, 307, 308, 319, 328 dan 330. Sedangkan 17 responden dengan skor total terendah yaitu responden nomor; 18, 29, 33, 39, 44, 48, 54, 59, 63, 69, 78, 84, 88, 94, 99, 103 dan 113. Adapun rekapitulasi responden dengan skor tertinggi dan terendah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8: Rekapitulasi Responden Dengan Skor Total Tertinggi

Responden	Nilai Per - Pertanyaan										Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
21	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	46
23	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
147	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	47
154	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
198	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
212	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	46
227	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	46
248	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	46
269	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	46
286	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
298	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	46
306	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	47
307	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	46
308	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	46
319	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	46
328	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	46
330	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	46
Jumlah	78	80	82	84	80	75	76	78	79	78	790

Sumber: data primer diolah, 2012

Tabel 9: Rekapitulasi Responden Dengan Skor Total Terendah

Responden	Nilai Per - Pertanyaan										Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
29	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	34
33	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
39	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
44	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	33
48	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
54	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
59	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	33
63	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
69	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
78	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	33
84	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	33
88	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	33
94	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	32
99	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	33
103	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	33
113	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
Jumah	51	51	51	61	62	51	51	56	67	68	569

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan pengamatan respon dari para responden dengan skor tertinggi dan respon dari responden dengan skor terendah, terdapat ketidaksamaan respon mengenai nilai tertinggi dan terendah per unsur dari pernyataan-pernyataan yang diajukan.

Untuk responden dengan skor tertinggi, jumlah nilai per unsur pertanyaan tertinggi adalah pertanyaan ke 4. Sedangkan jumlah nilai per unsur pertanyaan terendah adalah pertanyaan ke 6.

Untuk responden dengan skor terendah, jumlah nilai per unsur pertanyaan tertinggi adalah pertanyaan ke 10. Sedangkan jumlah nilai per unsur pertanyaan terendah adalah pertanyaan ke 1,2,3,6 dan 7.

Dari hasil pengamatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan respon dari responden terhadap nilai per unsur pertanyaan terendah yaitu pertanyaan ke 6.

Hasil tersebut diatas jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi respon dari keseluruhan responden ternyata memiliki beberapa kesamaan juga. Dari hasil keseluruhan responden, jumlah nilai per unsur tertinggi adalah unsur ke 10 . Sedangkan jumlah nilai per unsur terendah adalah unsur ke 7.

Dari hasil tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdapat konsistensi respon dari total responden dengan respon dari kelompok responden dengan skor

terendah. Dengan ini kita dapat mengetahui variabel/sub variabel mana yang dapat diterima responden dan variabel/sub variabel mana yang memerlukan perhatian lebih demi meningkatkan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Analisa Diagram Kontrol Rata-rata x

Untuk melakukan analisa menggunakan diagram kontrol tersebut, terlebih dahulu harus diketahui nilai rata-rata dari rata-rata sampel yang diamati seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel 7 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata dari rata-rata sampel adalah 40,14 dengan jumlah seluruh rentang per respon adalah 22. Dari hasil tersebut diatas, dapat kita hitung :

1. Rata-rata dari rata-rata sampel / Garis sentral.

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\sum \bar{x}}{K} = \frac{40,14}{10} \\ &= 4,01 \end{aligned}$$

Jadi dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Rata-rata dari rata-rata sampel/garis sentralnya adalah 4,01.

2. Rata-rata rentang dari semua sampel.

$$\begin{aligned} \bar{R} &= \frac{\sum R}{k} = \frac{22}{10} \\ &= 2,20 \end{aligned}$$

Jadi dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Rata-rata rentang dari semua sampelnya adalah 2,20

3. Batas Kontrol Bawah (BKB).

Dimana:

$$BKB = X - A_2 R$$

$$R = 4,01 - (0,134) (2,20) = 3,71$$

Jadi dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Batas Kontrol Bawah (BKB) untuk diagram kontrolnya adalah 3,71

4. Batas Kontrol Atas (BKA).

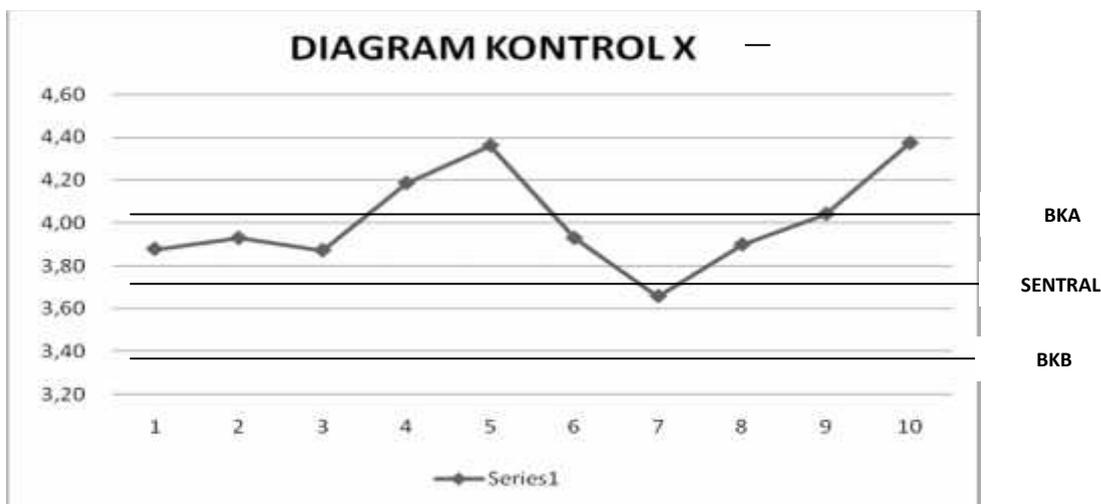
$$\begin{aligned} BKA &= X + A_2 R \\ &= 4,01 + (0,134) (2,20) \\ &= 4,30 \end{aligned}$$

Jadi dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Batas Kontrol Atas (BKA) untuk diagram kontrolnya adalah 4,30

5. Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x} .

Dari hasil perhitungan tersebut diatas dapat dibuat Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x} seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2: Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x}



Berdasarkan apa yang dapat kita lihat pada Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x} tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sampel / unsur pertanyaan yang berada di atas Batas Kontrol Atas (BKA) dan juga terdapat beberapa sampel / unsur yang berada di bawah Batas Kontrol Bawah (BKB).

Unsur/sampel yang berada diatas Batas Kontrol Atas (BKA) adalah unsur pertanyaan/sampel ke 5 (*Saudara sudah mengetahui dan paham mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku saat ini?*) dan 10 (*Setujukah saudara bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan*

akan membayar pajak?). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas diberikan respon yang sangat bagus oleh para responden.

Unsur pertanyaan/sampel yang berada dibawah Batas Kontrol Bawah (BKB) adalah unsur pertanyaan/sampel ke 7 (*Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?*). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas memiliki respon yang buruk dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang harus segera dicari penyebabnya dan dilakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut karena hal ini dapat berimbas kepada animo wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang pada akhirnya dapat berimbas pula pada tingkat pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, evaluasi dan penelitian yang mendalam perlu segera dilakukan untuk mencari penyebab dan solusinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah

Kabupaten Tulungagung yang berada disebelah barat dari Ibukota Kabupaten Tulungagung yang terbagi kedalam 11 Desa dengan luas wilayah keseluruhannya adalah 105,78 Km².

2. Jumlah total penduduk di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung hingga Desember 2011 berjumlah 46.836 jiwa dengan 14.629 jumlah Kepala Keluarga (KK).
3. Mayoritas penduduk di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah mencapai 10.855 jiwa.
4. Mayoritas wajib pajak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan memilih mekanisme pembayaran dengan cara menitipkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya kepada aparat Desa setempat untuk disetorkan ke Bank persepsi melalui Kantor Kecamatan.
5. Berdasarkan hasil analisis data melalui Diagram Kontrol Rata-rata \bar{x} , terdapat beberapa unsure sampel yang terletak diatas Batas Kontrol Atas yaitu unsur pertanyaan/sampel ke 5 (*Saudara sudah mengetahui dan paham mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku saat ini?*) dan 10 (*Setujukah saudara bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan*

membayar pajak?). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas diberikan respon yang sangat bagus oleh para responden..

6. Unsur pertanyaan/*sampel yang berada dibawah Batas Kontrol Bawah (BKB)* adalah unsur pertanyaan/sampel ke 7 (*Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?*). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas memiliki respon yang buruk dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang harus segera dicari penyebabnya dan dilakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut.
7. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sangat memahami mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku dan menyetujui bahwa tingkat pendapatan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun sebagian besar wajib pajak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung merasa keberatan membayar pajak secara sukarela.

Walaupun kinerja aparat Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung beserta pamong desa dilingkup Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sudah terlaksana dengan baik, namun kinerja

yang baik tadi harus tetap dipertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan agar tidak ada keterlambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak harus terus dilakukan agar para wajib pajak mau memenuhi kewajibannya dengan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Pajak Bumi dan Bangunan 2000*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak. Edisi Revisi. Cetakan Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Education, Binauf. 2005. *Pajak Terapan Brevet A dan B Buku Kedua*. Suarabaya: Binauf.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. 1998. No. 16/PJ.6/1998. *Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Jakarta*
- Keputusan Menteri Keuangan, 1998, No. 523/KMK.04/1998, *Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB, Jakarta*
- Keputusan Menteri Keuangan. 2000. No. 201/KMK.04/200. *Tentang Penetapan Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak. Jakarta*.
- Lumbantoruan. Shopar. 1996. *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahagiyani, Tjahjono, Achmad. 2001. *Perpajakan Indonesia. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir. 1997. *Perpajakan. Edisi Kelima*. Yogyakarta: Liberty.

- Murdiasmo. 1997. Perpajakan. Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.*
- Musgrave, Richard A, and Musgrave, Peggy B. 1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.*
- Peraturan Pemerintah. 2000. No. 16 Tahun 2000. Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah. 2002. No. 25 Tahun 2002. Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta*
- Sidik, Machfud, dan Soewondo. 1994. Keuangan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka.*
- Soemitro, Rochmad. 1997. Perpajakan. Edisi Revisi. Bandung: PT Eresco.*
- Undang-undang, 1994, No. 12 Tahun 1994. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta.*